



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Rabu
14
Februari
2024



LAPORAN EVALUASI PEMILU TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



www.kaltim.kpu.go.id



[kpu_kaltim](https://www.instagram.com/kpu_kaltim)



[KPU Provinsi Kaltim](https://www.facebook.com/KPUProvinsiKaltim)



[@kpukaltim_ofc](https://twitter.com/kpukaltim_ofc)



[KPU Provinsi Kalimantan Timur](https://www.youtube.com/KPUProvinsiKalimantanTimur)

PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024 dapat selesai disusun. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan bertujuan untuk menyajikan informasi proses tahapan, program, kegiatan dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Kalimantan Timur, serta sebagai dokumentasi kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Diharapkan dengan adanya Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi kita semua serta menjadi kegiatan yang mendukung tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk kedepannya.

Tentunya kami sadar masih ada banyak hal yang perlu disempurnakan dalam Laporan ini sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami perlukan agar kami dapat terus melakukan perbaikan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dapat semakin baik dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum dikemudian hari.

Samarinda, 30 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur,



Fahmi Idris

SAMBUTAN

Tidak lupa kami sampaikan terimakasih sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang turut membantu mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kami sampaikan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. DPRD Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
4. Korem 091/Aji Suryanata Kusuma
5. Kodam VI/Mulawarman
6. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur
7. Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur
8. Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur
9. Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur
10. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
13. Komisi Informasi Kalimantan Timur
14. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
15. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur
16. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur;
17. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur;
18. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur;
19. Kepala Bagian di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
20. Kepala Sub Bagian di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
21. Seluruh staf pelaksana KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PENGANTAR.....	ii
SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	3
C. TUJUAN	4
D. MANFAAT	5
BAB II DESAIN EVALUASI	8
A. KRITERIA EVALUASI	8
B. PRINSIP EVALUASI	10
C. METODE EVALUASI	11
BAB III HASIL EVALUASI	13
A. EVALUASI TAHAPAN DAN NON-TAHAPAN.....	13
B. EVALUASI KELEMBAGAAN	56
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	83
A. SIMPULAN	83
B. SARAN	83
BAB V PENUTUP.....	85

DAFTAR TABEL

Table 1 PKPU 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih	13
Table 2 SK KPU 27/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih	14
Table 3 Ketepatan waktu pembentukan Pantarlih	14
Table 4 Jumlah Pantarlih	15
Table 5 Kesesuaian data hasil cokit.....	15
Table 6 Pantarlih bekerja sesuai ketentuan.....	16
Table 7 Penggunaan e-cokit oleh Pantarlih	16
Table 8 Penetapan DPT.....	17
Table 9 Penetapan DPS.....	17
Table 10 Kasus Pelanggaran yang Terjadi.....	18
Table 11 Pelaksanaan PKPU.....	18
Table 12 Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual	18
Table 13 Helpdesk	19
Table 14 Pengguna Helpdesk.....	19
Table 15 Verifikasi.....	20
Table 16 Sipol	20
Table 17 Kasus Pelanggaran yang Terjadi.....	20
Table 18 PKPU Dapil	21
Table 19 Data kependudukan	21
Table 20 7 Prinsip	22
Table 21 Kasus Pelanggaran yang Terjadi.....	22
Table 22 Koordinasi	22
Table 23 Koordinasi	23
Table 24 Koordinasi	23
Table 25 Koordinasi	24
Table 26 Koordinasi	24
Table 27 PKPU.....	24
Table 28 Penetapan DCS	25
Table 29 Penetapan DCT	25
Table 30 Tanggapan Masyarakat	26
Table 31 Perubahan DCT	26

Table 32 Pelanggaran	27
Table 33 Silon	27
Table 34 PKPU APK	27
Table 35 Surat Pemberitahuan Kampanye	28
Table 36 APK	28
Table 37 Koordinasi	29
Table 38 SIKADEKA	29
Table 39 Laporan dana kampanye	30
Table 40 Rekening Khusus	31
Table 41 LADK	31
Table 42 LPPDK.....	31
Table 43 Audit KAP	32
Table 44 Temuan Audit.....	32
Table 45 Pelanggaran & Sengketa	32
Table 46 Pemahaman Aturan	33
Table 47 Jumlah TPS.....	33
Table 48 Tepat Waktu	33
Table 49 Kekurangan Surat Suara.....	34
Table 50 Pemilih Terhalangi Hak Pilihnya	34
Table 51 Ketepatan Waktu.....	34
Table 52 Pelanggaran dan Sengketa.....	35
Table 53 Jumlah Pelanggaran	35
Table 54 Jumlah Sengketa	36
Table 55 Penggunaan Sirekap.....	36
Table 56 Presentase Kegagalan Penggunaan Sirekap oleh KPPS	37
Table 57 Rekap Tingkat PPK tidak sesuai jadwal	37
Table 58 Rekap Tingkat Kab/Kota tidak sesuai jadwal.....	37
Table 59 Penggunaan Sirekap.....	38
Table 60 Kasus Pelanggaran.....	38
Table 61 Jumlah Pelanggaran	38
Table 62 Jumlah Sengketa	39
Table 63 Waktu Penetapan Hasil Pemilu	39
Table 64 Sengketa PHPU PILPRES.....	39

Table 65 Sengketa PHPU Pemilu DPR	40
Table 66 Sengketa PHPU Pemilu DPRD Provinsi.....	40
Table 67 Sengketa PHPU Pemilu DPRD Kab/Kota.....	40
Table 68 Sengketa PHPU Pemilu DPD	41
Table 69 kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil	41
Table 70 jumlah pelanggaran dalam proses penetapan hasil	42
Table 71 jumlah pelanggaran & sengketa dalam proses penetapan hasil.....	42
Table 72 pemungutan suara ulang	42
Table 73 rekapitulasi suara ulang	42
Table 74 Jumlah Masyarakat Terpapar Sosialisasi	43
Table 75 Jumlah Bahan Sosialisasi	43
Table 76 Sosialisasi Peraturan Kampanye	43
Table 77 Jumlah Masyarakat Terpapar Sosialisasi	44
Table 78 Sosialisasi Pungut & Hitung	44
Table 79 Jumlah Masyarakat Terpapar Sosialisasi	44
Table 80 Renstra dan RKP	44
Table 81 Key Performance Indikator.....	44
Table 82 Koordinasi Stackholder	45
Table 83 Teknologi Informasi Yang Terintegrasi	45
Table 84 Pemetaan Kelompok Sasaran	45
Table 85 Ketercapaian Sosialisasi	45
Table 86 Pemetaan Kelompok Sasaran	46
Table 87 Ketersediaan ABS disabilitas	46
Table 88 media elektronik	46
Table 89 media sosial	46
Table 90 tingkat partisipasi masyarakat.....	46
Table 91 keabsahan surat suara.....	47
Table 92 tingkat kesadaran pemilih	47
Table 93 Program Edukasi Pemilih.....	47
Table 94 Regulasi Logistik Pemilu	47
Table 95 Kebutuhan Logistik.....	47
Table 96 Alokasi Anggaran Logistik.....	48
Table 97 DIPA Mencukupi Untuk Pengelolaan Logistik	48

Table 98 Sertifikat PBj.....	48
Table 99 Pegawai yang tidak bersertifikat PBj.....	48
Table 100 Pokja PBj.....	49
Table 101 pengadaan Logistik Pemilu	49
Table 102 penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pemilu	49
Table 103 review APIP	49
Table 104 keselamatan dan keamanan pendistribusian	50
Table 105 kendala koordinasi pengamanan logistik Pemilu.....	50
Table 106 dokumen prosedur pengamanan pendistribusian logistik Pemilu	50
Table 107 dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik Pemilu	50
Table 108 permasalahan hukum pengadaan logistik Pemilu	50
Table 109 persentase sanggahan.....	51
Table 110 persentase efisiensi anggaran Pengadaan Logistik Pemilu	51
Table 111 validasi contoh cetak produk Logistik Pemilu	51
Table 112 monitoring produksi di pabrik	51
Table 113 dokumen standarisasi kualitas surat suara.....	51
Table 114 sistem informasi monitoring proses pengiriman logistik	52
Table 115 mitigasi dalam hal terjadi hambatan pengiriman logistik	52
Table 116 standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu	52
Table 117 peran Pemerintah Daerah mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang	52
Table 118 sortir dan hitung	53
Table 119 standar pemeliharaan terhadap logistik Pemilu.....	53
Table 120 petunjuk teknis Penyelesaian perkara hukum	53
Table 121 petunjuk teknis mudah diimplementasikan	53
Table 122 jumlah perkara hukum di Bawaslu	54
Table 123 jumlah perkara hukum di PTTUN.....	54
Table 124 jumlah perkara hukum di DKPP.....	54
Table 125 jumlah perkara hukum di PN.....	54
Table 126 sengketa hukum baru.....	54
Table 127 perkara hukum yang dimenangkan oleh KPU	55
Table 128 Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU di Bawaslu	55
Table 129 Perkara Hukum yang dimenangkan KPU di PTTUN	55

Table 130 Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU di DKPP	55
Table 131 Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU di PN.....	56
Table 132 Orientasi Tugas.....	56
Table 133 Modul Orientasi Tugas	56
Table 134 aturan pembentukan Badan Adhoc	56
Table 135 materi bimtek pembentukan Badan Adhoc.....	56
Table 136 Modul Bimtek KPPS & PPS	57
Table 137 helpdesk pembentukan Badan Adhoc	57
Table 138 Helpdesk Badan Adhoc Bekerja dengan baik	57
Table 139 supervisi dan monitoring kendala pembentukan Badan Adhoc	57
Table 140 penetapan Badan Adhoc.....	57
Table 141 kendala dalam pembentukan PPK.....	57
Table 142 kendala dalam pembentukan Pantarlih	58
Table 143 kendala dalam pembentukan TPS.....	58
Table 144 diskresi melalui jalur mandiri	58
Table 145 Melalui jalur penunjukan/kerja sama.....	58
Table 146 CAT pada seleksi PPK.....	59
Table 147 Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT	59
Table 148 CAT pada seleksi PPS.....	59
Table 149 Jumlah Badan Adhoc Yang Pernah Menjadi Penyelenggara Pemilu Sebelumnya.....	59
Table 150 anggota PPK yang pernah menjadi Badan Adhoc	59
Table 151 anggota PPS yang pernah menjadi Badan Adhoc	60
Table 152 anggota Pantarlih yang pernah menjadi PPS Adhoc	60
Table 153 anggota KPPS yang pernah menjadi Badan Adhoc.....	60
Table 154 Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan.....	60
Table 155 PPK/Kecamatan yang menyampaikan laporan tepat waktu.....	61
Table 156 PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan tepat waktu	61
Table 157 KPPS/TPS yang menyampaikan laporan tepat waktu	61
Table 158 Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja	61
Table 159 internal yang harmonis.....	61
Table 160 en jumlah PPK/Kecamatan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat	62

Table 161 PPK/Kecamatan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu	62
Table 162 PPS/Desa/Kelurahan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu	62
Table 163 KPPS/TPS diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu	62
Table 164 PPK/PPS/KPPS yang diberhentikan secara tidak hormat.....	62
Table 165 PAW Badan Adhoc	63
Table 166 Penyaluran Anggaran Badan Adhoc.....	63
Table 167 Penyaluran Anggaran Badan Adhoc sesuai Kebutuhan	63
Table 168 laporan pertanggungjawaban keuangan	63
Table 169 laporan pertanggungjawaban badan adhoc	64
Table 170 format laporan pertanggungjawaban keuangan mudah dipahami badan adhoc.....	64
Table 171 laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc secara tepat waktu	64
Table 172 laporan pertanggungjawaban sesuai dengan petunjuk teknis	64
Table 173 aplikasi SITAB	64
Table 174 aplikasi SITAB	65
Table 175 aplikasi SITAB	65
Table 176 akun belanja sesuai dengan bukti pertanggungjawaban.....	65
Table 177 Metode Bimtek pengelolaan keuangan badan adhoc secara berjenjang..	65
Table 178 jumlah KPU Kabupaten/Kota dan badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Provinsi	65
Table 179 jumlah badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Kabupaten/Kota	66
Table 180 petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan	66
Table 181 kebutuhan PPK & PBJ sudah terpenuhi	66
Table 182 metode pembelajaran efektif untuk menunjang tingkat kelulusan.....	66
Table 183 Persentase tingkat kelulusan pada pelaksanaan pelatihan PBJ	66
Table 184 E-Catalog Nasional telah dilakukan probity Audit oleh APIP	67
Table 185 logistik yang dikontrakkan telah sesuai dengan kebutuhan	67
Table 186 Spesifikasi logistik yang diterima telah sesuai dengan kontrak.....	67
Table 187 PIPK	67
Table 188 bimtek penyusunan laporan keuangan	67
Table 189 pelaksanaan penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan & penghapusan persediaan pemilu	68

Table 190 tindaklanjut temuan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilu ..	68
Table 191 pengelolaan aset.....	68
Table 192 pelaksanaan wasdal menunjang optimalisasi aset.....	68
Table 193 pengendalian pengelolaan aset	69
Table 194 jumlah SDM pengelola persediaan Pemilu	69
Table 195 SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan persediaan pemilu	69
Table 196 sarana prasarana penyelenggaraan Pemilu.....	69
Table 197 Sarana yang disediakan Pusat/Pemda.....	69
Table 198 pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu oleh KPU ..	70
Table 199 sosialisasi strategi pencapaian IPA oleh KPU	70
Table 200 anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2022 ...	70
Table 201 revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022	70
Table 202 penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2022.....	70
Table 203 petunjuk teknis penggunaan anggaran.....	71
Table 204 KPU memahami petunjuk teknis penggunaan anggaran	71
Table 205 penggunaan anggaran DIPA sesuai petunjuk teknis 2022.....	71
Table 206 penggunaan anggaran DIPA sesuai petunjuk teknis.....	71
Table 207 RAB yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan.....	71
Table 208 anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2023 ...	71
Table 209 revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023	72
Table 210 penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2023.....	72
Table 211 petunjuk teknis penggunaan anggaran.....	72
Table 212 penggunaan anggaran DIPA sesuai petunjuk teknis 2023.....	72
Table 213 RAB yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan.....	72
Table 214 Pedoman Teknis penyusunan MOU dan PKS.....	73
Table 215 Pedoman Teknis dapat mudah dipahami	73
Table 216 MOU dan PKS sudah terlaksana	73
Table 217 tindaklanjut kerja sama sudah sesuai	73
Table 218 dokumen kerjasama.....	73
Table 219 MOU dan PKS.....	74
Table 220 MOU dan PKS yang di reviu APIP	74
Table 221 Standar Operasional Prosedur	74
Table 222 Standar Operasional Prosedur di susun sesuai Aturan.....	74

Table 223 SOP	74
Table 224 SOP yang telah diimplementasikan	75
Table 225 Reviu dan Evaluasi SOP	75
Table 226 aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas	75
Table 227 SDM yang bersertifikat	75
Table 228 monitoring dan evaluasi realisasi capaian output	75
Table 229 tindaklanjut hasil evaluasi capaian output	76
Table 230 unit kerja yang menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output	76
Table 231 nilai kinerja anggaran Tahun 2022	76
Table 232 nilai kinerja anggaran Tahun 2023	76
Table 233 LKjIP	76
Table 234 LKjIP disusun sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014	77
Table 235 Program Kegiatan sesuai IKU	77
Table 236 penerapan good governance pada LKjP	77
Table 237 evaluasi akuntabilitas kinerja internal	77
Table 238 aplikasi e-SAKIP Reviu	77
Table 239 penilaian LKjIP mencapai target tahunan	77
Table 240 e-Monev Bappenas dan SMART DJA	78
Table 241 penyusunan dokumen laporan	78
Table 242 Laporan Keuangan setiap Semester dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU	78
Table 243 Laporan PIPK telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU	78
Table 244 Kebutuhan PPK & PBJ	78
Table 245 Reformasi Birokrasi	79
Table 246 Tim Reformasi Birokrasi	79
Table 247 SOTK	79
Table 248 duplikasi terhadap tugas dan fungsi	79
Table 249 Kerimbangan Beban Kerja Antar Unit	79
Table 250 Penyederhanaan Struktur Organisasi	80
Table 251 penyederhanaan struktur organisasi meningkatkan kinerja	80
Table 252 evaluasi kelembagaan	80
Table 253 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	80
Table 254 Rekomendasi hasil Evaluasi Pelayanan Publik	80

Table 255 Rekomendasi sudah ditindaklanjuti	81
Table 256 Nilai Capaian Indeks Pelayanan Publik	81
Table 257 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).....	81
Table 258 Rekomendasi pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81
Table 259 Rekomendasi SKM sudah ditindaklanjuti	81
Table 260 Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKM	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024, Sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dalam Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Evaluasi secara umum diartikan sebagai kegiatan untuk mengkaji sebuah program atau kegiatan yang dimaksudkan menemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi, mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor yang menyebabkannya serta menilai capaian dari program tersebut. Evaluasi pemilu itu sendiri merupakan kegiatan untuk mereview dan menilai pelaksanaan tahapan pemilu guna mengetahui permasalahan, kendala, hambatan dalam penyelenggaraan pemilu, serta mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor pendukungnya, sehingga akan dapat menghasilkan kesimpulan dan saran perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 yang selesai dilaksanakan, KPU Provinsi menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilu tersebut. Evaluasi merujuk kepada pendapat William Dun (2014:2) adalah *Policy analysis is a*

process of multidisciplinary inquiry aiming at the mation. As a problem-solving discipline, it draws on social science methods, theories, and substantive findings to solve practical problems. Evaluasi melibatkan serangkaian kegiatan untuk melakukan penaksiran (*appraisal*), memberi skor (*rating*), dan menilai (*assessment*), segala hal yang berhubungan dengan cara untuk memproduksi dan melakukan analisis informasi berkaitan dengan nilai dan manfaat dari kebijakan.

Dalam kerangka tersebut, evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini mencakup penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan pemilu), serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. Adapun ruang lingkup obyek evaluasi mencakup penyelenggaraan pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Adhoc.

Penyelenggaraan evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu yang tersedia, mengingat bahwa hingga saat ini masih terdapat tahapan pemilu berupa penetapan hasil pemilu secara nasional yang belum selesai karena masih adanya perselisihan hasil pemilu yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, juga sedang menyelenggarakan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak.

Oleh karenanya, evaluasi ini dilaksanakan dengan menggunakan instrumen survey, dimana kuesioner survey diisi oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Data yang diperoleh dari survey ini akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan potret penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya.

Evaluasi diharapkan dapat berguna untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak (eksplanasi) sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati, mengantisipasi perubahan

yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya, mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan, mengukur *cost effectiveness* dan *cost-efficiency*, mengetahui dampak dari kebijakan, sebagai kontrol terhadap kebijakan (mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya), serta menghasilkan rekomendasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);

C. TUJUAN

Disamping memenuhi ketentuan pasal 20 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, dimana dalam Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan bertujuan untuk menyajikan informasi proses tahapan, program, kegiatan dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Kalimantan Timur, serta sebagai dokumentasi kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Secara umum tujuan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency. Dengan evaluasi maka dapat dilakukan audit keefektifan biaya pengeluaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan beserta manfaatnya dapat diketahui (Akbar & Mohi, 2018; Halimah, 2020; Hayat, 2019).
2. Mengetahui dampak dari kebijakan. Dengan evaluasi maka akan terlihat pengaruh positif dan negatif dari kebijakan terhadap masyarakat sehingga dapat memperbaiki keadaan masyarakat (Akbar & Mohi, 2018; Halimah, 2020; Mergoni & De Witte, 2022).
3. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk menyediakan instrumen kontrol terhadap kebijakan atau program yang sedang dikerjakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Akbar & Mohi, 2018; Halimah, 2020).

4. Evaluasi juga dapat menjadi instrumen untuk menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau program di masa mendatang. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dampak intervensi eksogen dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat sehingga evaluasi berperan penting dalam mendorong perbaikan kebijakan yang akan datang (Akbar & Mohi, 2018; Mergoni & De Witte, 2022).
5. Evaluasi juga bertujuan untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati (Halimah, 2020; Hayat, 2019).

Evaluasi Pemilu Serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU ini secara khusus memiliki tujuan untuk:

1. Menilai penyelenggaraan pemilu tahun 2024: baik dari aspek tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkatan;
2. Membangun model dan standar evaluasi pemilu: yang mencakup ruang lingkup, pendekatan, metodologi, dan standar capaian hasil evaluasi yang akan dapat diadopsi menjadi model dan standar evaluasi pemilu dan pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

D. MANFAAT

Menemukan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Saran perbaikan ini nantinya akan dapat dipergunakan oleh internal KPU, dan juga dapat disampaikan kepada stakeholder pemilu, yang mencakup pemerintah, DPR dan pihak-pihak lainnya.

Menghasilkan model dan standar kegiatan evaluasi yang akan dapat dipergunakan oleh KPU Provinsi untuk melakukan evaluasi pemilu dan pemilihan di masa mendatang. Manfaat ini sangat penting, karena hingga saat ini, KPU belum memiliki pola, model dan standar kegiatan evaluasi baku yang dapat diterapkan secara konsisten dan akuntabel untuk mengevaluasi

penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga membawa beberapa manfaat yang secara umum berguna untuk penguatan organisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun manfaat kelembagaan yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ini adalah:

1. Manfaat dalam menyediakan penilaian dan rekomendasi untuk pengembangan kualitas kinerja pegawai. Temuan yang didapatkan dari hasil evaluasi pada aspek kinerja implementasi kebijakan atau program dapat menghasilkan saran atau masukan kepada pimpinan lembaga terkait kinerja pegawai dalam mengatasi permasalahan pelanggan (Halimah, 2020).
2. Evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga menghasilkan informasi terkait tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan perintah undang-undang dan kebijakan organisasi. Informasi ini bermanfaat untuk merumuskan upaya perbaikan kepatuhan dan perilaku aparatur di masa mendatang.
3. Hasil kegiatan evaluasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong akreditasi organisasi berdasarkan standar internasional (sertifikasi ISO). Sertifikasi ISO ini menjadi bagian dari arah kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong kinerja organisasi pemerintah dalam menghadapi tantangan kredibilitas atau akurasi kebijakan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa pada suatu lembaga (Al Hudib & Cousins, 2022).
4. Evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam membudayakan praktek akuntabilitas di dalam organisasi KPU di seluruh tingkatan.
5. Hasil evaluasi pemilu serentak ini juga bermanfaat dalam menyediakan umpan balik bagi pimpinan dan pegawai KPU. Sebagaimana dinyatakan oleh Posavac & Carey, evaluasi dapat menyediakan tanggapan balik terhadap pelayanan sosial yang telah diberikan oleh sebuah lembaga (Halimah, 2020).
6. Hasil evaluasi pemilu serentak ini, dalam beberapa aspek tertentu, dapat menjadi triger untuk munculnya penemuan teori baru terkait dengan manajemen pemilu, misalnya terkait dengan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu adhoc, penggunaan sistem IT dalam pemilu, dan lain-

lain. Tentunya hal ini mempersyaratkan adanya penelitian lanjutan atas beberapa temuan hasil evaluasi pemilu serentak.

BAB II

DESAIN EVALUASI

A. KRITERIA EVALUASI

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;
2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekwensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (ex-ante);
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau

ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;

4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Evaluasi pemilu ini dirancang berdasarkan atas beberapa kriteria mengacu kepada pendapat Frohock, Poister, dan Edwards Schuman kriteria berikut:

1. Kesesuaian penyelenggaraan pemilu dengan tujuan pemilu.
2. Efektivitas, kecukupan dan kesesuaian.
3. Keadilan, optimalitas, dan kepentingan public/

B. PRINSIP EVALUASI

Evaluasi pemilu Serentak tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Kombinasi antara penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja (satker) di lingkungan KPU Provinsi dengan penyediaan bukti-bukti administratif (*Self assessment combined with evidence based evaluation*).
2. Prinsip Comprehensiveness yang berarti bahwa kegiatan evaluasi difokuskan kepada penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dan evaluasi kelembagaan (organisasi).

3. Prinsip Partisipatif, yang berarti bahwa kegiatan evaluasi ini diselenggarakan dengan melibatkan seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan unsur masyarakat.

C. METODE EVALUASI

Evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 ini menggunakan metode campuran (*mixed-methods*) antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dipergunakan untuk menggali data, mengkaji dan mengukur capaian pelaksanaan tahapan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 secara kuantitatif, termasuk untuk menemukan pengaruh dan dampak antar variabel evaluasi. Sedangkan metode kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor pendukung keberhasilan capaian dalam penyelenggaraan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024. Penggunaan metode campuran ini diharapkan akan dapat menghasilkan potret yang utuh dan komprehensif dalam menilai penyelenggaraan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas: data primer yakni data yang diperoleh dari informan yang mencakup komisioner KPU Prov/Kab/Kota dan sekretariat KPU Prov/Kab/Kota, dan stakeholder pemilu lainnya; dan data sekunder yang terdiri atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu, dokumen administrasi dan keuangan. Di samping itu, data sekunder ini juga mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan non-hukum.

Penggalan data (primer maupun sekunder) dalam evaluasi ini Responden dalam evaluasi menggunakan metode survey yang melibatkan responden KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Responden ini tidak mewakili individu komisioner maupun individu pegawai sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, namun mewakili lembaga. Dengan demikian, KPU Provinsi

diposisikan sebagai satu responden yang mewakili lembaga KPU Provinsi yang terdiri atas 10 responden KPU Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

HASIL EVALUASI

Penyelenggaraan evaluasi Pemilu serentak tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, dilakukan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama adalah metode survey internal, dan kedua adalah penggalian data secara kualitatif melalui kegiatan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) dengan melibatkan pihak eksternal.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa untuk menghasilkan potret proses penyelenggaraan tahapan pemilu dan penyediaan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Hasil analisa tersebut akan disajikan di dalam Bab III ini secara kuantitatif dan kualitatif, yang dimulai dari penyajian hasil Analisa atas dimensi tahapan dan non-tahapan pemilu dan dimensi kelembagaan.

A. EVALUASI TAHAPAN DAN NON-TAHAPAN

- Evaluasi Tahapan

Evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu serentak tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan KPU kepada seluruh satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pertanyaan mencakup indikator tahapan pemilu dan sub-indikator yang meliputi aspek-aspek penting di dalam masing-masing tahapan pemilu. Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh satker (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) dapat digambarkan data sebagai berikut:

1. Tahapan Pendaftaran Pemilih

a. Regulasi Teknis Penyusunan Daftar Pemilih

Apakah PKPU 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilaksanakan secara utuh?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 1 PKPU 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden menyatakan bahwa PKPU 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilaksanakan secara utuh. Ini menunjukkan bahwa responden percaya bahwa PKPU ini dapat diimplementasikan sepenuhnya.

Apakah SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri mudah dipahami?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 2 SK KPU 27/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden menyatakan bahwa SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri mudah dipahami. Ini menunjukkan bahwa semua responden merasa pedoman tersebut jelas dan mudah dimengerti.

b. Ketepatan waktu pembentukan Pantarlih

Apakah Pantarlih di bentuk tepat waktu?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 3 Ketepatan waktu pembentukan Pantarlih

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) Pantarlih dibentuk tepat waktu, ini menunjukkan bahwa semua Pantarlih telah dibentuk sesuai jadwal.

c. Kesesuaian jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS

Apakah jumlah Pantarlih sesuai dengan jumlah TPS yang terbentuk?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 4 Jumlah Pantarlih

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) Pantarlih sesuai dengan jumlah TPS yang terbentuk, ini menunjukkan bahwa mayoritas besar Pantarlih telah disesuaikan dengan jumlah TPS yang terbentuk.

d. Kendala dalam rekrutmen Pantarlih

Proses pembentukan Pantarlih secara umum berjalan lancar sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3 dimana 100% (10) responden (satker) Pantarlih dibentuk tepat waktu. Namun demikian, data kualitatif yang diperoleh menunjukkan adanya beberapa kendala yang perlu diperhatikan.

Merespon pertanyaan tentang kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen Pantarlih, 3 responden (satker) mengeluhkan tentang keterbatasan jumlah pelamar yang tertarik untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih. Rendahnya animo masyarakat ini dipicu oleh beberapa factor, antara lain gaji yang dinilai kurang memadai atau standar honor yang rendah dan syarat surat keterangan sehat yang dianggap membebani calon karena di suatu wilayah yang jauh biasanya hanya tersedia puskesmas serta letak geografis suatu daerah seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.

e. Persentase kesesuaian data bahan cokolit dengan hasil cokolit yang dilaksanakan Pantarlih

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menjawab	0	0	0	0
	0% - 20%	1	10,0	10,0	10,0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	0	0	0	0
	81% - 100%	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 5 Kesesuaian data hasil cokolit

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa kesesuaian antara data bahan cokit dan hasil cokit yang dilaksanakan oleh Pantarlih tidak terlalu bervariasi di berbagai rentang persentase. Sebagian besar responden, yaitu 90,0% (9), melaporkan bahwa kesesuaian berada dalam rentang 81% - 100%, yang menunjukkan bahwa mayoritas besar merasa data bahan cokit sangat sesuai dengan hasil cokit yang dilakukan. Untuk rentang 0% - 20% sebesar 10,0% (1) responden saja. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa kesesuaian antara data bahan cokit dan hasil cokit yang dilaksanakan oleh Pantarlih sangat tinggi, dengan sebagian kecil mengalami ketidaksesuaian yang lebih rendah.

f. Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 6 Pantarlih bekerja sesuai ketentuan

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ini menunjukkan bahwa semua responden percaya bahwa Pantarlih telah mematuhi ketentuan yang berlaku.

g. Persentase penggunaan e-cokit oleh Pantarlih

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menjawab	0	0	0	0
	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	0	0	0	0
	81% - 100%	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 7 Penggunaan e-cokit oleh Pantarlih

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden Pantarlih menggunakan ecoklit dalam rentang 81% - 100%, yang menunjukkan bahwa mayoritas besar Pantarlih telah memanfaatkan ecoklit secara luas.

h. Ketepatan waktu penetapan DPS dan DPT

Apakah DPS ditetapkan sesuai jadwal?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 8 Penetapan DPT

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa DPS (Daftar Pemilih Sementara) ditetapkan sesuai jadwal, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa penetapan DPS telah dilakukan tepat waktu.

Apakah DPT ditetapkan sesuai jadwal?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 9 Penetapan DPS

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa DPT (Daftar Pemilih Tetap) ditetapkan sesuai jadwal, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa penetapan DPT telah dilakukan tepat waktu.

i. Akses masyarakat terhadap cekdptonline

Untuk akses Masyarakat terhadap cek DPTonline hanya dapat dilakukan oleh KPU RI.

j. Kepatuhan hukum (kejadian pelanggaran pemilu) dalam pendaftaran pemilih

Apakah terjadi kasus pelanggaran dalam pendaftaran pemilih?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 10 Kasus Pelanggaran yang Terjadi

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan tidak terjadi kasus pelanggaran dalam pendaftaran pemilih, ini menunjukkan bahwa mayoritas besar responden merasa bahwa pendaftaran pemilih dilakukan tanpa pelanggaran.

2. Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu

- a. *Apakah PKPU tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dapat dilaksanakan secara utuh?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	10	100,0	100,0
	Total	10	10	100,0	100,0

Table 11 Pelaksanaan PKPU

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa PKPU tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dapat dilaksanakan secara utuh, ini menunjukkan bahwa semua responden percaya bahwa PKPU ini dapat diimplementasikan sepenuhnya.

- b. *Apakah semua Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah lulus verifikasi administrasi, dilakukan verifikasi faktual?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	10	100,0	100,0
	Total	10	10	100,0	100,0

Table 12 Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa semua Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah lulus verifikasi administrasi telah dilakukan verifikasi

faktual, ini menunjukkan bahwa mayoritas besar responden percaya bahwa proses verifikasi faktual telah dilakukan secara menyeluruh untuk semua partai politik yang telah lulus verifikasi administrasi.

- c. *Apakah dibentuk layanan Helpdesk untuk Partai Politik Calon Peserta Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	10	100,0	100,0
	Total	10	10	100,0	100,0

Table 13 Helpdesk

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa layanan Helpdesk untuk Partai Politik Calon Peserta Pemilu telah dibentuk, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa layanan Helpdesk telah tersedia untuk mendukung partai politik calon peserta pemilu.

- d. *Berapa jumlah bakal calon peserta pemilu yang mengakses layanan Helpdesk?*

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 70,0% (7) responden melaporkan bahwa jumlah bakal calon peserta pemilu yang mengakses layanan Helpdesk berada dalam rentang 1 hingga 10 kasus. Selanjutnya, 10,0% (1) responden melaporkan bahwa jumlah yang mengakses layanan berada dalam rentang 21 hingga 30 kasus, dan 20,0% (2) responden melaporkan jumlah dalam lebih dari 40 kasus.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 - 10 kasus	7	70,0	70,0	70,0
	11 - 20 kasus	0	0	0	0
	21 - 30 kasus	1	10,0	10,0	10,0
	31 - 40 kasus	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 14 Pengguna Helpdesk

- e. *Apakah dilakukan verifikasi/pencermatan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah melakukan Pemutahiran Keanggotaan dan Pengurus Partai Politik?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	10	100,0	100,0
	Total	10	10	100,0	100,0

Table 15 Verifikasi

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa verifikasi atau pencermatan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilakukan apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah melakukan Pemutahiran Keanggotaan dan Pengurus Partai Politik, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa proses verifikasi atau pencermatan dilakukan secara konsisten setelah pemutahiran keanggotaan dan pengurus partai politik.

- f. *Apakah penggunaan Aplikasi Sipol membantu dalam proses tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	10	100,0	100,0
	Total	10	10	100,0	100,0

Table 16 Sipol

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa penggunaan Aplikasi Sipol membantu dalam proses tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa Aplikasi Sipol memberikan dukungan yang signifikan dalam proses verifikasi faktual.

- g. *Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa proses pada saat pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 17 Kasus Pelanggaran yang Terjadi

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa tidak terdapat pelanggaran dan sengketa proses selama pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu, ini menunjukkan bahwa semua responden proses verifikasi faktual berlangsung tanpa masalah besar.

3. Tahapan Daerah Pemilihan

- a. *Apakah PKPU 6 Tahun 2022 dan Keputusan KPU 488 Tahun 2022 dapat diimplementasikan dengan baik dalam penataan dapil dan alokasi kursi?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 18 PKPU Dapil

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 90% (9) responden melaporkan bahwa PKPU 6 Tahun 2022 dan Keputusan KPU 488 Tahun 2022 dapat diimplementasikan dengan baik dalam penataan dapil dan alokasi kursi, sementara 10,0% (1) responden melaporkan bahwa hampir semua responden merasa bahwa peraturan dan keputusan tersebut diterapkan dengan efektif, dengan hanya sebagian kecil yang merasa sebaliknya.

- b. *Apakah data kependudukan dan data wilayah administrasi sebagai bahan pembuatan daerah pemilihan, akurat?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 19 Data kependudukan

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa data kependudukan dan data wilayah administrasi yang digunakan sebagai bahan pembuatan daerah pemilihan adalah akurat, ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam pembuatan daerah pemilihan dapat diandalkan.

c. *Apakah 7 prinsip penentuan Dapil dapat dilaksanakan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 20 7 Prinsip

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa tujuh prinsip penentuan daerah pemilihan (Dapil) dapat dilaksanakan dengan baik, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa prinsip-prinsip penentuan Dapil diimplementasikan dengan efektif.

d. *Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa proses dalam proses penentuan Dapil?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 21 Kasus Pelanggaran yang Terjadi

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa tidak terdapat pelanggaran dan sengketa proses dalam proses penentuan daerah pemilihan (Dapil), ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa proses penentuan Dapil berjalan tanpa masalah hukum atau sengketa.

4. Tahapan Pencalonan

a. *Apakah KPU Prov/Kab/Kota melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan pencalonan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 22 Koordinasi

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa KPU melakukan koordinasi yang diperlukan dalam proses tahapan pencalonan.

- b. *Apakah KPU Prov/Kab/Kota dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 23 Koordinasi

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa koordinasi dengan Dinas Pendidikan dilakukan secara efektif.

- c. *Apakah KPU Prov/Kab/Kota dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 24 Koordinasi

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa KPU melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Dinas Kesehatan selama tahapan pencalonan.

- d. *Apakah KPU Prov/Kab/Kota dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, melakukan koordinasi dengan Kepolisian?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 25 Koordinasi

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Dinas Kepolisian dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa KPU secara efektif melakukan koordinasi dengan Dinas Kepolisian selama tahapan pencalonan.

- e. *Apakah KPU Prov/Kab/Kota dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, melakukan koordinasi dengan Pengadilan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 26 Koordinasi

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Pengadilan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa KPU melakukan koordinasi dengan Pengadilan secara efektif selama tahapan pencalonan.

- f. *Apakah Peraturan KPU pencalonan dapat diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan tahapan pencalonan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 27 PKPU

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa Peraturan KPU mengenai

pencalonan dapat diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa peraturan pencalonan telah diterapkan secara efektif.

- g. *Apakah Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 28 Penetapan DCS

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa penetapan DCS telah dilakukan sesuai jadwal.

- h. *Apakah Daftar Calon Tetap (DCT) telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 29 Penetapan DCT

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa Daftar Calon Tetap (DCT) telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa penetapan DCT telah dilakukan sesuai jadwal.

- i. *Apakah ada Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara yang berdampak kepada Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	8	80,0	80,0	80,0

	Ya	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 30 Tanggapan Masyarakat

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 20% (2) responden melaporkan bahwa terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara yang berdampak pada penggantian calon anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sementara itu, 80,0% (8) responden melaporkan bahwa tidak ada masukan atau tanggapan masyarakat yang mempengaruhi penggantian calon. Ini menunjukkan bahwa sebagian kecil dari responden mengalami dampak dari masukan masyarakat terhadap daftar calon, sedangkan mayoritas tidak melihat adanya pengaruh seperti itu..

- j. *Apakah setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan perubahan terhadap Daftar Calon Tetap?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	9	90,0	90,0	90,0
	Ya	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 31 Perubahan DCT

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 90% (9) responden melaporkan bahwa tidak ada perubahan terhadap Daftar Calon Tetap setelah penetapan, 10,0% (1) responden melaporkan bahwa setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan perubahan terhadap Daftar Calon Tetap dikarenakan calon meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak melihat adanya perubahan setelah penetapan.

- k. *Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa TUN Pemilu dalam tahapan pencalonan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 32 Pelanggaran

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa melaporkan tidak adanya pelanggaran atau sengketa dalam tahapan tersebut, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa responden tidak mengalami masalah terkait pelanggaran atau sengketa TUN dalam proses pencalonan.

I. *Apakah bakal calon menggunakan aplikasi SILON?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 33 Silon

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa bakal calon menggunakan aplikasi SILON, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa mayoritas besar bakal calon memanfaatkan aplikasi SILON dalam proses pendaftaran.

5. Tahapan Kampanye

a. *Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 serta perubahannya, dan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 serta perubahannya sudah ideal dengan kemampuan anggaran?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 34 PKPU APK

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 serta perubahannya, dan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 serta perubahannya sudah ideal dengan kemampuan anggaran, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa fasilitasi APK dan Iklan Kampanye telah diterapkan dengan baik sesuai ketentuan dan anggaran yang ada.

- b. *Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Peserta Pemilu sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 35 Surat Pemberitahuan Kampanye

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa peserta pemilu sudah mematuhi peraturan dengan memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa peserta pemilu mematuhi ketentuan mengenai pemberitahuan pelaksanaan kampanye.

- c. *Apakah Peserta Pemilu memenuhi tanggung jawab untuk pembersihan Alat Peraga Kampanye yang dipasang dengan baik?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 36 APK

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 90% (9) responden melaporkan bahwa peserta pemilu memenuhi tanggung

jawab untuk pembersihan Alat Peraga Kampanye yang dipasang dengan baik. Sementara itu, 10,0% (1) responden menyatakan bahwa peserta pemilu tidak memenuhi tanggung jawab tersebut karena keterbatasan waktu, ini menunjukkan bahwa semua responden merasa bahwa sebagian besar peserta pemilu telah melakukan pembersihan APK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. *Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 37 Koordinasi

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 80% (8) responden melaporkan bahwa batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri. Sementara itu, 20,0% (2) responden merasa bahwa batas waktu tersebut tidak cukup memadai karena keterbatasan waktu, ini menunjukkan bahwa mayoritas responden percaya bahwa waktu rilis SK tersebut efektif dalam memfasilitasi koordinasi dengan pihak kepolisian.

- e. *Apakah peserta pemilu memanfaatkan aplikasi SIKADEKA?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menjawab	0	0	0	0
	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	1	10,0	10,0	10,0
	81% - 100%	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 38 SIKADEKA

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 90% (9) peserta pemilu memanfaatkan aplikasi SIKADEKA secara penuh, dengan penggunaan mencapai 81% - 100%. Sebagian kecil, yaitu 10,0% (1) peserta, memanfaatkan aplikasi ini dalam rentang 61% - 80% hal ini karena server down, ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pemilu telah memanfaatkan aplikasi tersebut secara optimal.

- f. *Berapa persen peserta pemilu yang mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menjawab	0	0	0	0
	0% - 20%	1	10,0	10,0	10,0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	2	20,0	20,0	20,0
	81% - 100%	7	70,0	70,0	70,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 39 Laporan dana kampanye

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 70% (7) peserta pemilu mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye secara penuh, dengan pelaporan mencapai 81% - 100%. Sebagian kecil, yaitu 20% (2) peserta, mematuhi ketentuan pelaporan dalam rentang 61% - 80%. Sisanya 10,0% (1) peserta dalam rentang 0% - 20%, ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta pemilu telah mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye secara optimal.

- g. *Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan rekening khusus dana kampanye?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menjawab	0	0	0	0
	1 - 10 kasus	10	100,0	100,0	100,0
	11 - 20 kasus	0	0	0	0
	21 - 30 kasus	0	0	0	0
	31 - 40 kasus	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

	Total	10	100,0	100,0	
--	-------	----	-------	-------	--

Table 40 Rekening Khusus

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) peserta pemilu tidak menyampaikan rekening khusus dana kampanye dalam rentang 1 - 10 kasus, ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta pemilu tidak mengalami masalah dalam menyampaikan rekening khusus dana kampanye.

- h. *Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menjawab	0	0	0	0
	1 - 10 kasus	10	100,0	100,0	100,0
	11 - 20 kasus	0	0	0	0
	21 - 30 kasus	0	0	0	0
	31 - 40 kasus	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 41 LADK

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) peserta pemilu tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dalam rentang 1 - 10 kasus, ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta pemilu tidak mengalami masalah dalam menyampaikan LADK.

- i. *Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan LPPDK?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menjawab	0	0	0	0
	1 - 10 kasus	10	100,0	100,0	100,0
	11 - 20 kasus	0	0	0	0
	21 - 30 kasus	0	0	0	0
	31 - 40 kasus	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 42 LPPDK

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) peserta pemilu tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dalam rentang 1 - 10 kasus, ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta pemilu tidak mengalami masalah dalam menyampaikan LPPDK.

j. *Apakah seluruh laporan dana kampanye diaudit oleh KAP?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 43 Audit KAP

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa laporan dana kampanye diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), ini menunjukkan bahwa laporan dana kampanye telah mengikuti proses audit sesuai ketentuan.

k. *Apakah ada temuan dari hasil audit oleh KAP?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 44 Temuan Audit

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa laporan dana kampanye tidak memiliki temuan dari hasil audit, ini menunjukkan bahwa laporan dana kampanye bersih dari temuan audit.

l. *Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa terkait kampanye?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 45 Pelanggaran & Sengketa

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden melaporkan bahwa tidak ada pelanggaran dan sengketa dalam pelaksanaan kampanye.

6. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. *Apakah terdapat KPPS yang tidak memahami peraturan dan pedoman penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	9	90,0	90,0	90,0
	Ya	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 46 Pemahaman Aturan

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 90% (9) KPPS memahami peraturan dan pedoman tersebut. Sementara, bahwa 10% (1) KPPS tidak memahami peraturan dan pedoman penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar KPPS telah memahami aturan yang berlaku, meskipun masih ada KPPS yang memerlukan pemahaman lebih lanjut.

- b. *Berapa jumlah TPS di wilayah anda?*

KPU Kab/Kota	Jumlah TPS
KPU Kabupaten Kutai Barat	532
KPU Kota Bontang	277
KPU Kota Balikpapan	2047
KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	542
KPU Kabupaten Berau	807
KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	2269
KPU Kabupaten Kutai Timur	1185
KPU Kabupaten Paser	846
KPU Kota Samarinda	2563
KPU Kabupaten Mahakam Ulu	118

Table 47 Jumlah TPS

- c. *Apakah terdapat TPS yang melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan jadwal?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 48 Tepat Waktu

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) TPS melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan jadwal yang

ditentukan, ini menunjukkan bahwa mayoritas TPS mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.

d. *Apakah terdapat TPS yang kekurangan surat suara?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	8	80,0	80,0	80,0
	Ya	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 49 Kekurangan Surat Suara

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 80% (8) responden yang TPSnya tidak mengalami kekurangan surat suara. Namun, 20% (2) responden yang melaporkan TPS di daerahnya ada kekurangan surat suara. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar TPS memiliki persediaan surat suara yang cukup, tetapi masih ada sejumlah TPS yang mengalami kekurangan surat suara, yang mungkin memerlukan perhatian dan solusi lebih lanjut.

e. *Apakah terdapat pemilih yang terhalangi haknya dalam memberikan suara di TPS?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 50 Pemilih Terhalangi Hak Pilihnya

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden menyatakan tidak terdapat pemilih yang mengalami halangan dalam memberikan suara di TPS.

f. *Apakah penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan tepat waktu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 51 Ketepatan Waktu

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden menyatakan penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan tepat waktu.

- g. *Apakah terdapat kasus pelanggaran dan sengketa dalam proses penghitungan suara oleh KPPS?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	8	80,0	80,0	80,0
	Ya	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 52 Pelanggaran dan Sengketa

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 80% (8) dari proses penghitungan suara oleh KPPS tidak mengalami kasus pelanggaran atau sengketa. Namun, 20% (2) kasus di mana pelanggaran atau sengketa terjadi dalam proses tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses penghitungan suara berjalan tanpa masalah, tetapi ada sejumlah kasus yang menghadapi pelanggaran atau sengketa yang perlu ditangani.

- h. *Berapa jumlah pelanggaran dalam proses penghitungan suara oleh KPPS yang terjadi?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menjawab	8	80,0	80,0	80,0
	1 - 10 kasus	1	10,0	10,0	10,0
	21 - 30 kasus	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 53 Jumlah Pelanggaran

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 80% (8) dari proses penghitungan suara oleh KPPS tidak mengalami pelanggaran. Sementara itu, 10% (1) kasus mengalami pelanggaran dalam rentang 1 - 10 kasus. Hanya 10% (1) kasus yang mengalami pelanggaran dalam rentang 21 - 30 kasus. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses penghitungan suara tidak menghadapi pelanggaran, tetapi ada beberapa kasus dengan pelanggaran yang perlu perhatian lebih lanjut.

- i. *Berapa jumlah sengketa dalam proses penghitungan suara oleh KPPS yang terjadi?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menjawab	8	80,0	80,0	80,0
	1 - 10 kasus	1	10,0	10,0	10,0
	21 - 30 kasus	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 54 Jumlah Sengketa

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 80% (8) dari proses penghitungan suara oleh KPPS tidak mengalami sengketa. Sementara itu, 10% (1) kasus mengalami sengketa dalam rentang 1 - 10 kasus. Hanya 10% (1) kasus yang mengalami sengketa dalam rentang 21 - 30 kasus. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses penghitungan suara tidak menghadapi sengketa, tetapi ada beberapa kasus dengan sengketa yang perlu perhatian lebih lanjut.

- j. *Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS berjalan dengan baik?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 55 Penggunaan Sirekap

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 90% (9) dari penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS berjalan dengan baik. Sebagian besar KPPS melaporkan bahwa penggunaan aplikasi ini efektif dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Namun, 10% (1) melaporkan adanya masalah atau ketidakberhasilan dalam penggunaan aplikasi tersebut, menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan penggunaan aplikasi Sirekap yang lebih efektif di masa mendatang.

- k. *berapa persen kasus terkait kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menjawab	9	90,0	90,0	90,0
	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	1	10,0	10,0	10,0
	81% - 100%	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 56 Presentase Kegagalan Penggunaan Sirekap oleh KPPS

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 90% (9) dari penggunaan aplikasi Sirekap tidak menjawab. Namun, 10% (1) melaporkan mengalami kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap dalam rentang 61% - 80%.

- l. *Apakah terdapat PPK yang melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 57 Rekap Tingkat PPK tidak sesuai jadwal

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) responden menyatakan PPK melaksanakan rekapitulasi suara sesuai dengan jadwal.

- m. *Apakah KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 58 Rekap Tingkat Kab/Kota tidak sesuai jadwal

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi suara sesuai dengan jadwal.

- n. *Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi berjalan dengan baik?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 59 Penggunaan Sirekap

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 90% (9) melaporkan bahwa penggunaan aplikasi Sirekap berjalan dengan baik. Sebaliknya, 10% (1) melaporkan adanya masalah dalam penggunaan aplikasi tersebut.

- o. *Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	7	70,0	70,0	70,0
	Ya	3	30,0	30,0	30,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 60 Kasus Pelanggaran

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 30% (3) kasus melaporkan adanya pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi. Sebagian besar, yaitu 70% (7), menyatakan tidak terdapat kasus pelanggaran.

- p. *Berapa jumlah pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menjawab	7	70,0	70,0	70,0
	1 - 10 kasus	3	30,0	30,0	30,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 61 Jumlah Pelanggaran

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 30% (3) kasus melaporkan adanya pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi, dengan

pelanggaran terjadi dalam rentang 1 - 10 kasus. Sebagian besar, yaitu 70% (7), menyatakan tidak terdapat pelanggaran.

- q. *Berapa jumlah sengketa dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menjawab	7	70,0	70,0	70,0
	1 - 10 kasus	3	30,0	30,0	30,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 62 Jumlah Sengketa

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 30% (3) kasus melaporkan adanya sengketa dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi, dengan sengketa terjadi dalam rentang 1 - 10 kasus. Sebagian besar, yaitu 70% (7), menyatakan tidak terdapat sengketa.

7. Tahapan Penetapan Hasil

- a. *Apakah tahapan penetapan hasil pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 63 Waktu Penetapan Hasil Pemilu

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) dari tahapan penetapan hasil pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

- b. *Berapa jumlah kasus sengketa (PHPU) PILPRES di wilayah anda?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada kasus	8	80,0	80,0	80,0
	1 - 10 kasus	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 64 Sengketa PHPU PILPRES

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 20% (2) wilayah melaporkan terdapat 1 - 10 kasus sengketa (PHPU) PILPRES. Sementara itu, 80% (8) menyatakan tidak terdapat kasus sengketa (PHPU) PILPRES.

c. *Berapa jumlah kasus sengketa (PHPU) Pemilu DPR di wilayah anda?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada kasus	5	50,0	50,0	50,0
	1 - 10 kasus	5	50,0	50,0	50,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 65 Sengketa PHPU Pemilu DPR

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 50% (5) wilayah melaporkan terdapat 1 - 10 kasus sengketa (PHPU) Pemilu DPR. Sementara itu, 50% (5) menyatakan tidak terdapat kasus sengketa (PHPU) Pemilu DPR.

d. *Berapa jumlah kasus sengketa (PHPU) Pemilu DPRD Provinsi di wilayah anda?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada kasus	9	90,0	90,0	90,0
	1 - 10 kasus	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 66 Sengketa PHPU Pemilu DPRD Provinsi

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 10% (1) wilayah melaporkan terdapat 1 - 10 kasus sengketa (PHPU) Pemilu DPRD Provinsi. Sementara itu, 90% (9) menyatakan tidak terdapat kasus sengketa (PHPU) Pemilu DPRD Provinsi.

e. *Berapa jumlah kasus sengketa (PHPU) Pemilu DPRD Kab/Kota di wilayah anda?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada kasus	8	80,0	80,0	80,0
	1 - 10 kasus	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 67 Sengketa PHPU Pemilu DPRD Kab/Kota

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 10% (2) wilayah melaporkan terdapat 1 - 10 kasus sengketa (PHPU) Pemilu DPRD Kab/Kota. Sementara itu, 80% (1) menyatakan tidak terdapat kasus sengketa (PHPU) Pemilu DPRD Kab/Kota. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah tidak mengalami sengketa signifikan dalam Pemilu DPRD Kab/Kota.

f. *Berapa jumlah kasus sengketa (PHPU) Pemilu DPD di wilayah anda?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada kasus	9	90,0	90,0	90,0
	1 - 10 kasus	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 68 Sengketa PHPU Pemilu DPD

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 10% (1) wilayah melaporkan terdapat 1 - 10 kasus sengketa (PHPU) Pemilu DPD. Sementara itu, 90% (1) menyatakan tidak terdapat kasus sengketa (PHPU) Pemilu DPD. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah tidak mengalami sengketa signifikan dalam Pemilu DPD.

g. *Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di Kab/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	7	70,0	70,0	70,0
	Ya	3	30,0	30,0	30,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 69 kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 70% (7) wilayah melaporkan tidak adanya kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di tingkat Kab/Kota. Sebaliknya, 30% (3) wilayah melaporkan adanya kasus pelanggaran.

h. *Berapa jumlah pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di Kab/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menjawab	7	70,0	70,0	70,0
	1 - 10 kasus	3	30,0	30,0	30,0

	Total	10	100,0	100,0	
--	-------	----	-------	-------	--

Table 70 jumlah pelanggaran dalam proses penetapan hasil

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 30% (3) wilayah melaporkan adanya pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di tingkat Kab/Kota dengan jumlah kasus 1 – 10 kasus, sedangkan, 70% (7) wilayah tidak memberikan informasi mengenai pelanggaran ini.

- i. *Berapa jumlah pelanggaran dan sengketa dalam proses penetapan hasil pemilu di Kab/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Menjawab	7	70,0	70,0	70,0
	1 - 10 kasus	3	30,0	30,0	30,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 71 jumlah pelanggaran & sengketa dalam proses penetapan hasil

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 30% (3) wilayah melaporkan adanya pelanggaran dan sengketa dalam proses penetapan hasil pemilu di tingkat Kab/Kota dengan jumlah kasus 1 - 10, sedangkan, 70% (7) wilayah tidak memberikan informasi mengenai pelanggaran dan sengketa ini.

- j. *Apakah terdapat pemungutan suara ulang di wilayah anda?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 72 pemungutan suara ulang

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 100% (10) wilayah tidak mengalami pemungutan suara ulang.

- k. *Apakah terdapat rekapitulasi suara ulang di wilayah anda?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	50,0	50,0	50,0
	Ya	5	50,0	50,0	50,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 73 rekapitulasi suara ulang

Berdasarkan data yang ditampilkan, disimpulkan bahwa 50% (5) wilayah tidak melaksanakan rekapitulasi suara ulang, sementara 50% (5) wilayah melaporkan adanya rekapitulasi suara ulang.

- Evaluasi Non-Tahapan

1. Sosialisasi Pemilu

- a. *Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi mekanisme pendaftaran pemilih? (jumlah peserta kegiatan sosialisasi dibandingkan dengan jumlah pemilih di Prov/Kab/Kota)?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	2	20,0	20,0	20,0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	3	30,0	30,0	30,0
	61% - 80%	2	20,0	20,0	20,0
	81% - 100%	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 74 Jumlah Masyarakat Terpapar Sosialisasi

- b. *Apakah jumlah bahan sosialisasi tentang Partai Politik Peserta Pemilu 2024 (dari anggaran APBN) cukup memadai?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 75 Jumlah Bahan Sosialisasi

- c. *Apakah KPU Kab/Kota melakukan sosialisasi tentang peraturan kampanye?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 76 Sosialisasi Peraturan Kampanye

- d. *Berapa jumlah peserta pemilu yang terpapar kegiatan sosialisasi peraturan kampanye?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	1	10,0	10,0	10,0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0

	41% - 60%	2	20,0	20,0	20,0
	61% - 80%	2	20,0	20,0	20,0
	81% - 100%	4	40,0	40,0	40,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 77 Jumlah Masyarakat Terpapar Sosialisasi

- e. *Apakah KPU Kab/Kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 78 Sosialisasi Pungut & Hitung

- f. *Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	1	10,0	10,0	10,0
	61% - 80%	5	50,0	50,0	50,0
	81% - 100%	3	30,0	30,0	30,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 79 Jumlah Masyarakat Terpapar Sosialisasi

- g. *Dalam membuat rencana kegiatan sosialisasi, apakah KPU Kab/Kota merujuk kepada dokumen Renstra dan RKP?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 80 Renstra dan RKP

- h. *Apakah kegiatan yang dilakukan telah memenuhi Key Performance Indikator (KPI) sebagaimana disebutkan dalam renstra?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 81 Key Performance Indikator

- i. Apakah dalam menyelenggarakan sosialisasi, KPU Kab/Kota melakukan koordinasi dengan stackholder terkait?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 82 Koordinasi Stackholder

- j. Apakah sosialisasi oleh KPU Kab/Kota dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 83 Teknologi Informasi Yang Terintegrasi

- k. Apakah dalam merencanakan sosialisasi, KPU Kab/Kota memetakan kelompok sasaran yang akan dituju?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 84 Pemetaan Kelompok Sasaran

- l. Berapa persen jumlah ketercapaian sosialisasi berdasarkan kelompok sasaran?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	4	40,0	40,0	40,0
	61% - 80%	4	40,0	40,0	40,0
	81% - 100%	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 85 Ketercapaian Sosialisasi

- m. Apakah terdapat kecukupan anggaran dalam upaya mencapai kelompok sasaran yang sudah ditetapkan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0

	Total	10	100,0	100,0	
--	-------	----	-------	-------	--

Table 86 Pemetaan Kelompok Sasaran

- n. *Apakah ketersediaan alat bantu sosialisasi bagi kelompok disabilitas sudah memadai?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memadai	1	10,0	10,0	10,0
	Kurang Memadai	1	10,0	10,0	10,0
	Cukup Memadai	4	40,0	40,0	40,0
	Memadai	3	30,0	30,0	30,0
	Sangat Memadai	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 87 Ketersediaan ABS disabilitas

- o. *Berapa banyak jumlah media elektronik yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Kab/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-2 Jenis	1	10,0	10,0	10,0
	3-5 Jenis	6	60,0	60,0	60,0
	Lebih dari 5 Jenis	3	30,0	30,0	30,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 88 media elektronik

- p. *Berapa banyak jumlah media sosial yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Kab/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-5 Media Sosial	8	80,0	80,0	80,0
	6-10 Media Sosial	1	10,0	10,0	10,0
	11-15 Media Sosial	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 89 media sosial

- q. *Apakah tingkat partisipasi masyarakat yang hadir ke TPS sesuai dengan target yang ditetapkan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 90 tingkat partisipasi masyarakat

- r. *Berapa persen tingkat keabsahan surat suara pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	2	20,0	20,0	20,0
	81% - 100%	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 91 keabsahan surat suara

- s. *Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan survei terhadap tingkat kesadaran pemilih setelah dilakukan sosialisasi?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	4	40,0	40,0	40,0
	Ya	6	60,0	60,0	60,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 92 tingkat kesadaran pemilih

- t. *Berapa banyak liputan media dalam menyebarkan informasi, berita, dan program edukasi pemilih?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dibawah 50%	3	30,0	30,0	30,0
	50% - 75%	6	60,0	60,0	60,0
	75% - 100%	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 93 Program Edukasi Pemilih

2. Logistik Pemilu

- a. *Apakah regulasi Logistik Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 94 Regulasi Logistik Pemilu

- b. *Apakah jumlah kebutuhan logistik yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara di Kab/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 95 Kebutuhan Logistik

- c. *Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 96 Alokasi Anggaran Logistik

- d. *Apakah perencanaan anggaran yang tersedia pada DIPA mencukupi untuk pengelolaan logistik pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 97 DIPA Mencukupi Untuk Pengelolaan Logistik

- e. *Apakah jumlah pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Kab/Kota mencukupi untuk pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	3	30,0	30,0	30,0
	Ya	7	70,0	70,0	70,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 98 Sertifikat PBj

- f. *Apakah ada pegawai yang tidak mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Kab/Kota yang melakukan aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	9	90,0	90,0	90,0
	Ya	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 99 Pegawai yang tidak bersertifikat PBj

- g. *Apakah Jumlah Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk kebutuhan tahapan pengadaan Logistik Pemilu sesuai dengan jumlah Pengadaan Barang dan Jasa setiap jenis logistik Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 100 Pokja PBJ

- h. *Apakah pengadaan Logistik Pemilu dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 101 pengadaan Logistik Pemilu

- i. *Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pemilu, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam pengadaan, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 102 penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pemilu

- j. *Apakah dokumen persiapan pengadaan Logistik Pemilu dimaksud telah dilakukan review oleh APIP?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	3	30,0	30,0	30,0
	Ya	7	70,0	70,0	70,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 103 review APIP

- k. *Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 104 keselamatan dan keamanan pendistribusian

- l. *Apakah terdapat kendala koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pengiriman dan distribusi logistik Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 105 kendala koordinasi pengamanan logistik Pemilu

- m. *Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	4	40,0	40,0	40,0
	Ya	6	60,0	60,0	60,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 106 dokumen prosedur pengamanan pendistribusian logistik Pemilu

- n. *Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pemilu di KPU Kab/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	50,0	50,0	50,0
	Ya	5	50,0	50,0	50,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 107 dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik Pemilu

- o. *Apakah terdapat permasalahan hukum dalam proses pengadaan Logistik Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 108 permasalahan hukum pengadaan logistik Pemilu

- p. *Berapa persentase sanggahan yang ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja Pemilihan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	7	70,0	70,0	70,0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	1	10,0	10,0	10,0

	61% - 80%	1	10,0	10,0	10,0
	81% - 100%	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 109 persentase sanggahan

- q. *Berapa persentase efisiensi anggaran Pengadaan Logistik Pemilu (membandingkan nilai kontrak dengan nilai HPS)?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	3	70,0	70,0	70,0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	1	10,0	10,0	10,0
	81% - 100%	5	50,0	50,0	50,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 110 persentase efisiensi anggaran Pengadaan Logistik Pemilu

- r. *Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pemilu oleh PPK KPU Kab/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 111 validasi contoh cetak produk Logistik Pemilu

- s. *Apakah KPU Kab/Kota melakukan monitoring produksi di pabrik?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 112 monitoring produksi di pabrik

- t. *Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 113 dokumen standarisasi kualitas surat suara

- u. Apakah KPU Kab/Kota menggunakan sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 114 sistem informasi monitoring proses pengiriman logistik

- v. Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 115 mitigasi dalam hal terjadi hambatan pengiriman logistik

- w. Apakah KPU Kab/Kota dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 116 standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu

- x. Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 117 peran Pemerintah Daerah mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang

- y. Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pemilu setelah diterima dari pabrik?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 118 sortir dan hitung

- z. *Apakah KPU Kab/Kota dapat memenuhi standar pemeliharaan terhadap logistik Pemilu untuk menjaga kualitas Logistik Pemilu selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 119 standar pemeliharaan terhadap logistik Pemilu

3. Hukum

- a. *Apakah petunjuk teknis sebagai acuan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum mudah dipahami?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 120 petunjuk teknis Penyelesaian perkara hukum

- b. *Apakah petunjuk teknis tersebut mudah mengimplementasikan dalam menghadapi perselisihan sengketa hukum?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 121 petunjuk teknis mudah diimplementasikan

- c. *Berapa jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Kab/Kota di Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada perkara	3	30,0	30,0	30,0
	1-5 perkara	7	70,0	70,0	70,0
	6-10 perkara	0	0	0	0
	11-15 perkara	0	0	0	0

	Total	10	100,0	100,0	
--	-------	----	-------	-------	--

Table 122 jumlah perkara hukum di Bawaslu

- d. *Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Kab/Kota di PTUN dan/atau PTTUN?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada perkara	9	90,0	90,0	90,0
	1-5 perkara	1	10,0	10,0	10,0
	6-10 perkara	0	0	0	0
	11-15 perkara	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 123 jumlah perkara hukum di PTTUN

- e. *Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Kab/Kota di DKPP?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada perkara	8	80,0	80,0	80,0
	1-5 perkara	2	20,0	20,0	20,0
	6-10 perkara	0	0	0	0
	11-15 perkara	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 124 jumlah perkara hukum di DKPP

- f. *Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Kab/Kota di Pengadilan Negeri?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada perkara	8	80,0	80,0	80,0
	1-5 perkara	2	20,0	20,0	20,0
	6-10 perkara	0	0	0	0
	11-15 perkara	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 125 jumlah perkara hukum di PN

- g. *Apakah terdapat sengketa hukum baru setelah tindak lanjut putusan oleh KPU Kab/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	9	90,0	90,0	90,0
	Ya	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 126 sengketa hukum baru

- h. *Apakah terdapat perkara hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	50,0	50,0	50,0
	Ya	5	50,0	50,0	50,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 127 perkara hukum yang dimenangkan oleh KPU

- i. *Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Kab/Kota di Bawaslu Prov/Kab/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada perkara	5	50,0	50,0	50,0
	1-5 perkara	5	50,0	50,0	50,0
	6-10 perkara	0	0	0	0
	11-15 perkara	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 128 Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU di Bawaslu

- j. *Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Kab/Kota di PTUN?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada perkara	5	50,0	50,0	50,0
	1-5 perkara	5	50,0	50,0	50,0
	6-10 perkara	0	0	0	0
	11-15 perkara	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 129 Perkara Hukum yang dimenangkan KPU di PTTUN

- k. *Berapa Jumlah Perkara Gugatan yang dimenangkan KPU Kab/Kota di DKPP?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada perkara	5	50,0	50,0	50,0
	1-5 perkara	5	50,0	50,0	50,0
	6-10 perkara	0	0	0	0
	11-15 perkara	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 130 Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU di DKPP

- l. *Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Kab/Kota di Pengadilan Negeri?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada perkara	5	50,0	50,0	50,0
	1-5 perkara	5	50,0	50,0	50,0
	6-10 perkara	0	0	0	0
	11-15 perkara	0	0	0	0

	Total	10	100,0	100,0	
--	-------	----	-------	-------	--

Table 131 Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU di PN

B. EVALUASI KELEMBAGAAN

1. Sumber Daya Manusia

a. *Apakah seluruh Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengikuti Orientasi Tugas?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 132 Orientasi Tugas

b. *Apakah Modul Ortug mudah dipahami?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 133 Modul Orientasi Tugas

2. Pembentukan Badan Adhoc

a. *Apakah instrumen/aturan pembentukan Badan Adhoc mudah dilaksanakan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 134 aturan pembentukan Badan Adhoc

b. *Apakah materi bimbingan teknis pembentukan Badan Adhoc dapat membantu penyelenggaraan pembentukan badan adhoc?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 135 materi bimtek pembentukan Badan Adhoc

c. *Apakah Modul Bimtek KPPS & PPS mudah dipahami?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0

	Total	10	100,0	100,0	
--	-------	----	-------	-------	--

Table 136 Modul Bimtek KPPS & PPS

d. *Apakah satuan kerja membentuk helpdesk pembentukan Badan Adhoc?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 137 helpdesk pembentukan Badan Adhoc

e. *Apakah helpdesk pembentukan Badan Adhoc bekerja dengan baik?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 138 Helpdesk Badan Adhoc Bekerja dengan baik

f. *Apakah satuan kerja melakukan supervisi dan monitoring terhadap wilayah yang mengalami kendala dalam pembentukan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 139 supervisi dan monitoring kendala pembentukan Badan Adhoc

g. *Apakah ada Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS yang terlambat melakukan penetapan Badan Adhoc?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	8	80,0	80,0	80,0
	Ya	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 140 penetapan Badan Adhoc

h. *Jumlah Kecamatan yang mengalami kendala dalam pembentukan PPK?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	8	80,0	80,0	80,0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	1	10,0	10,0	10,0
	61% - 80%	0	0	0	0
	81% - 100%	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 141 kendala dalam pembentukan PPK

i. *Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan Pantarlih?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	6	60,0	60,0	60,0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	2	20,0	20,0	20,0
	61% - 80%	1	10,0	10,0	10,0
	81% - 100%	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 142 kendala dalam pembentukan Pantarlih

- j. *Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan TPS?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	9	90,0	90,0	90,0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	1	10,0	10,0	10,0
	61% - 80%	0	0	0	0
	81% - 100%	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 143 kendala dalam pembentukan TPS

- k. *Apakah ada Badan Adhoc yang mendaftar dengan persyaratan yang diberikan diskresi melalui jalur mandiri?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	50,0	50,0	50,0
	Ya	5	50,0	50,0	50,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 144 diskresi melalui jalur mandiri

- l. *Apakah ada Badan Adhoc yang mendaftar melalui jalur penunjukan/kerja sama?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	6	60,0	60,0	60,0
	Ya	4	40,0	40,0	40,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 145 Melalui jalur penunjukan/kerja sama

- m. *Jumlah Kecamatan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPK?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	8	80,0	80,0	80,0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	1	10,0	10,0	10,0
	61% - 80%	0	0	0	0
	81% - 100%	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 146 CAT pada seleksi PPK

- n. *Berapa jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	4	40,0	40,0	40,0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	1	10,0	10,0	10,0
	61% - 80%	0	0	0	0
	81% - 100%	5	50,0	50,0	50,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 147 Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT

- o. *Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPS?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	5	50,0	50,0	50,0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	0	0	0	0
	81% - 100%	4	40,0	40,0	40,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 148 CAT pada seleksi PPS

- p. *Berapa persen jumlah Badan Adhoc yang pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	3	30,0	30,0	30,0
	61% - 80%	3	30,0	30,0	30,0
	81% - 100%	4	40,0	40,0	40,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 149 Jumlah Badan Adhoc Yang Pernah Menjadi Penyelenggara Pemilu Sebelumnya

- q. *Jumlah anggota PPK yang pernah menjadi Badan Adhoc?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	4	40,0	40,0	40,0
	61% - 80%	3	30,0	30,0	30,0
	81% - 100%	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 150 anggota PPK yang pernah menjadi Badan Adhoc

r. *Jumlah anggota PPS yang pernah menjadi Badan Adhoc?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	3	30,0	30,0	30,0
	61% - 80%	4	40,0	40,0	40,0
	81% - 100%	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 151 anggota PPS yang pernah menjadi Badan Adhoc

s. *Jumlah anggota Pantarlih yang pernah menjadi PPS Adhoc?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	2	20,0	20,0	20,0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	4	40,0	40,0	40,0
	61% - 80%	2	20,0	20,0	20,0
	81% - 100%	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 152 anggota Pantarlih yang pernah menjadi PPS Adhoc

t. *Jumlah anggota KPPS yang pernah menjadi Badan Adhoc?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	2	20,0	20,0	20,0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	5	50,0	50,0	50,0
	61% - 80%	1	10,0	10,0	10,0
	81% - 100%	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 153 anggota KPPS yang pernah menjadi Badan Adhoc

u. *Berapa persen Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	3	30,0	30,0	30,0
	61% - 80%	1	10,0	10,0	10,0
	81% - 100%	6	60,0	60,0	60,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 154 Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan

v. *Jumlah PPK/Kecamatan yang menyampaikan laporan tepat waktu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	2	20,0	20,0	20,0
	41% - 60%	2	20,0	20,0	20,0

	61% - 80%	2	20,0	20,0	20,0
	81% - 100%	4	40,0	40,0	40,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 155 PPK/Kecamatan yang menyampaikan laporan tepat waktu

w. *Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan tepat waktu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	3	30,0	30,0	30,0
	41% - 60%	2	20,0	20,0	20,0
	61% - 80%	1	10,0	10,0	10,0
	81% - 100%	4	40,0	40,0	40,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 156 PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan tepat waktu

x. *Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan laporan tepat waktu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	3	30,0	30,0	30,0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	1	10,0	10,0	10,0
	61% - 80%	2	20,0	20,0	20,0
	81% - 100%	3	30,0	30,0	30,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 157 KPPS/TPS yang menyampaikan laporan tepat waktu

y. *Berapa persen Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	1	10,0	10,0	10,0
	61% - 80%	2	20,0	20,0	20,0
	81% - 100%	5	50,0	50,0	50,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 158 Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja

z. *Berapa persen jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	1	10,0	10,0	10,0
	81% - 100%	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 159 internal yang harmonis

aa. *Berapa persen jumlah PPK/Kecamatan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	9	90,0	90,0	90,0
	81% - 100%	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 160 en jumlah PPK/Kecamatan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat

bb. *Jumlah PPK/Kecamatan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	9	90,0	90,0	90,0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 161 PPK/Kecamatan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu

cc. *Jumlah PPS/Desa/Kelurahan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	10	100,0	100,0	100,0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 162 PPS/Desa/Kelurahan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu

dd. *Jumlah KPPS/TPS diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	9	90,0	90,0	90,0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 163 KPPS/TPS diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu

ee. *Apakah ada PPK/PPS/KPPS yang diberhentikan secara tidak hormat?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	10	100,0	100,0	100,0
	Ya	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 164 PPK/PPS/KPPS yang diberhentikan secara tidak hormat

ff. Apakah ada PAW pada Badan Adhoc yang dilakukan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 165 PAW Badan Adhoc

3. Sistem Informasi

a. Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 166 Penyaluran Anggaran Badan Adhoc

b. Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 167 Penyaluran Anggaran Badan Adhoc sesuai Kebutuhan

c. Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	1	10,0	10,0	10,0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	2	20,0	20,0	20,0
	61% - 80%	4	40,0	40,0	40,0
	81% - 100%	3	30,0	30,0	30,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 168 laporan pertanggungjawaban keuangan

d. Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 169 laporan pertanggungjawaban badan adhoc

- e. *Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan mudah dipahami oleh badan adhoc?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 170 format laporan pertanggungjawaban keuangan mudah dipahami badan adhoc

- f. *Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	1	10,0	10,0	10,0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	1	10,0	10,0	10,0
	61% - 80%	5	50,0	50,0	50,0
	81% - 100%	3	30,0	30,0	30,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 171 laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc secara tepat waktu

- g. *Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 172 laporan pertanggungjawaban sesuai dengan petunjuk teknis

- h. *Apakah badan adhoc menggunakan aplikasi SITAB dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemilu 2024?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 173 aplikasi SITAB

- i. *Apakah aplikasi SITAB mempermudah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemilu 2024?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0

	Total	10	100,0	100,0	
--	-------	----	-------	-------	--

Table 174 aplikasi SITAB

- j. *Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki badan adhoc memadai dalam penggunaan aplikasi SITAB?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 175 aplikasi SITAB

- k. *Apakah akun belanja yang digunakan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 176 akun belanja sesuai dengan bukti pertanggungjawaban

- l. *Apakah Metode pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan badan adhoc secara berjenjang efektif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan badan adhoc?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 177 Metode Bimtek pengelolaan keuangan badan adhoc secara berjenjang

- m. *Berapa persen jumlah KPU Kabupaten/Kota dan badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Provinsi?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	1	10,0	10,0	10,0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	1	10,0	10,0	10,0
	61% - 80%	1	10,0	10,0	10,0
	81% - 100%	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 178 jumlah KPU Kabupaten/Kota dan badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Provinsi

- n. *Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Kabupaten/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	1	10,0	10,0	10,0
	81% - 100%	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 179 jumlah badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Kabupaten/Kota

- o. *Apakah petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan badan adhoc dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 180 petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan

4. Pengadaan Barang dan Jasa

- a. *Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk seluruh satker di Indonesia?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	9	90,0	90,0	90,0
	Ya	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 181 kebutuhan PPK & PBJ sudah terpenuhi

- b. *Apakah metode pembelajaran efektif untuk menunjang tingkat kelulusan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	9	90,0	90,0	90,0
	Ya	1	10,0	10,0	10,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 182 metode pembelajaran efektif untuk menunjang tingkat kelulusan

- c. *Berapa persen tingkat kelulusan pada pelaksanaan pelatihan PBJ?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	4	40,0	40,0	40,0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	5	50,0	50,0	50,0
	61% - 80%	0	0	0	0
	81% - 100%	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 183 Persentase tingkat kelulusan pada pelaksanaan pelatihan PBJ

d. Apakah pelaksanaan E-Catalog Nasional telah dilakukan probity Audit oleh APIP?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 184 E-Catalog Nasional telah dilakukan probity Audit oleh APIP

e. Apakah logistik yang dikontrakkan telah sesuai dengan kebutuhan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 185 logistik yang dikontrakkan telah sesuai dengan kebutuhan

f. Apakah Spesifikasi logistik yang diterima telah sesuai dengan kontrak?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 186 Spesifikasi logistik yang diterima telah sesuai dengan kontrak

5. Laporan Keuangan

a. Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK secara tepat waktu?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 187 PIPK

b. Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan bimtek penyusunan laporan keuangan (semester, triwulan, dan tahunan)?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 188 bimtek penyusunan laporan keuangan

6. BMN

- a. *Apakah pelaksanaan penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 189 pelaksanaan penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan & penghapusan persediaan pemilu

- b. *Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 190 tindaklanjut temuan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilu

- c. *Apakah pemindahtanganan dan pemusnahan Persediaan Pemilu yang dilaksanakan KPU Provinsi/Kab/Kota memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang (Tertib Administrasi) optimal?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 191 pengelolaan aset

- d. *Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 192 pelaksanaan wasdal menunjang optimalisasi aset

- e. *Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0

	Total	10	100,0	100,0	
--	-------	----	-------	-------	--

Table 193 pengendalian pengelolaan aset

- f. *Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilu KPU Provinsi/Kab/Kota sudah cukup tersedia?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	50,0	50,0	50,0
	Ya	5	50,0	50,0	50,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 194 jumlah SDM pengelola persediaan Pemilu

- g. *Apakah SDM KPU Provinsi/Kab/Kota yang tersedia memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan persediaan Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	3	30,0	30,0	30,0
	Ya	7	70,0	70,0	70,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 195 SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan persediaan pemilu

- h. *Apakah telah tersedia cukup sarana prasarana (tanah, gedung, peralatan mesin, jaringan ATB dan Aset lainnya) yang memadai dalam penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi/Kab/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	4	40,0	40,0	40,0
	Ya	6	60,0	60,0	60,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 196 sarana prasarana penyelenggaraan Pemilu

- i. *Apakah pemenuhan sarana yang disediakan pemerintah pusat/pemerintah daerah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 197 Sarana yang disediakan Pusat/Pemda

- j. *Apakah strategi pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Provinsi/Kab/Kota sudah optimal?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	3	30,0	30,0	30,0

	Ya	7	70,0	70,0	70,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 198 pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu oleh KPU

- k. *Apakah sosialisasi strategi pencapaian IPA oleh KPU cukup membantu KPU Provinsi/Kab/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 199 sosialisasi strategi pencapaian IPA oleh KPU

7. Perencanaan

- a. *Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2022?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 200 anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2022

- b. *Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 201 revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022

- c. *Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	2	20,0	20,0	20,0
	81% - 100%	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 202 penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2022

- d. *Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 203 petunjuk teknis penggunaan anggaran

- e. *Apakah satuan kerja KPU memahami petunjuk teknis penggunaan anggaran?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 204 KPU memahami petunjuk teknis penggunaan anggaran

- f. *Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 205 penggunaan anggaran DIPA sesuai petunjuk teknis 2022

Table 206 penggunaan anggaran DIPA sesuai petunjuk teknis

- g. *Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 207 RAB yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan

- h. *Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2023?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 208 anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2023

- i. *Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 209 revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023

- j. *Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	2	20,0	20,0	20,0
	81% - 100%	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 210 penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2023

- k. *Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 211 petunjuk teknis penggunaan anggaran

- l. *Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 212 penggunaan anggaran DIPA sesuai petunjuk teknis 2023

- m. *Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 213 RAB yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan

8. Kerja Sama

- a. *Apakah tersedia pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 214 Pedoman Teknis penyusunan MOU dan PKS

- b. *Apakah pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 215 Pedoman Teknis dapat mudah dipahami

- c. *Apakah ruang lingkup kerja sama dalam MOU dan PKS sudah terlaksana?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 216 MOU dan PKS sudah terlaksana

- d. *Apakah tindaklanjut kerja sama yang dilaksanakan dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 217 tindaklanjut kerja sama sudah sesuai

- e. *Apakah kerjasama yang telah dilakukan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis)*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 218 dokumen kerjasama

- f. Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pemilu?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dibawah 50%	5	50,0	50,0	50,0
	50% - 75%	3	30,0	30,0	30,0
	75% - 100%	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 219 MOU dan PKS

- g. Apakah (MoU dan PKS) telah dilakukan reviu oleh APIP?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	4	40,0	40,0	40,0
	Ya	6	60,0	60,0	60,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 220 MOU dan PKS yang di reviu APIP

9. Standard Operational Procedure

- a. Apakah tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur disetiap Unit kerja?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 221 Standar Operasional Prosedur

- b. Apakah Standar Operasional Prosedur yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 222 Standar Operasional Prosedur di susun sesuai Aturan

- c. Berapa Jumlah SOP yang telah disusun dan ditetapkan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	2	20,0	20,0	20,0
	41% - 60%	5	50,0	50,0	50,0
	61% - 80%	1	10,0	10,0	10,0
	81% - 100%	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 223 SOP

d. Apakah SOP tersebut telah diimplementasikan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 224 SOP yang telah diimplementasikan

e. Apakah dilakukan Reviu dan Evaluasi SOP setiap tahun?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	4	40,0	40,0	40,0
	Ya	6	60,0	60,0	60,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 225 Reviu dan Evaluasi SOP

10. Monev Kelembagaan

a. Apakah satker melaporkan secara berkala capaian output program dan kegiatan melalui aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas secara tepat waktu?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 226 aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas

b. Apakah satker memiliki SDM yang bersertifikasi?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 227 SDM yang bersertifikat

c. Apakah KPU secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi capaian output?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 228 monitoring dan evaluasi realisasi capaian output

d. Apakah ada tindaklanjut dari hasil evaluasi capaian output pada unit kerja?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 229 tindaklanjut hasil evaluasi capaian output

e. berapa unit kerja yang menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	2	20,0	20,0	20,0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	1	10,0	10,0	10,0
	61% - 80%	4	40,0	40,0	40,0
	81% - 100%	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 230 unit kerja yang menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output

f. Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2022?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	4	40,0	40,0	40,0
	81% - 100%	5	50,0	50,0	50,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 231 nilai kinerja anggaran Tahun 2022

g. Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2023?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	0	0	0	0
	61% - 80%	6	60,0	60,0	60,0
	81% - 100%	4	40,0	40,0	40,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 232 nilai kinerja anggaran Tahun 2023

11. Pelaporan kelembagaan

a. Apakah LKjIP disusun tepat waktu ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 233 LKjIP

- b. *Apakah LKjIP disusun sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 /2014 ?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 234 LKjIP disusun sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014

- c. *Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 235 Program Kegiatan sesuai IKU

- d. *Apakah LKjIP telah mendukung dalam penerapan good governance?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 236 penerapan good governance pada LKjP

- e. *Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 237 evaluasi akuntabilitas kinerja internal

- f. *Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan aplikasi e-SAKIP Reviu?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	4	40,0	40,0	40,0
	Ya	6	60,0	60,0	60,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 238 aplikasi e-SAKIP Reviu

- g. *Apakah penilaian LKjIP mencapai target tahunan yang telah ditetapkan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 239 penilaian LKjIP mencapai target tahunan

- h. *Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi(e-Monev Bappenas dan SMART DJA)?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 240 e-Monev Bappenas dan SMART DJA

- i. *Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1	10,0	10,0	10,0
	Ya	9	90,0	90,0	90,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 241 penyusunan dokumen laporan

- j. *Apakah Laporan Keuangan setiap Semester dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 242 Laporan Keuangan setiap Semester dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU

- k. *Apakah Laporan PIPK telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 243 Laporan PIPK telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU

- l. *Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk Satker KPU Kabupaten/Kota?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	5	50,0	50,0	50,0
	Ya	5	50,0	50,0	50,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 244 Kebutuhan PPK &PBJ

12. Reformasi Birkokrasi

a. Apakah satker telah membentuk tim Reformasi Birokrasi?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 245 Reformasi Birokrasi

b. Apakah pembentukan Tim RB membantu mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 246 Tim Reformasi Birokrasi

13. SOTK

a. Apakah SOTK sudah sesuai kebutuhan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 247 SOTK

b. Apakah terdapat duplikasi terhadap tugas dan fungsi dalam struktur organisasi ?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	6	60,0	60,0	60,0
	Ya	4	40,0	40,0	40,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 248 duplikasi terhadap tugas dan fungsi

c. Apakah SOTK telah mewujudkan keberimbangan beban kerja antar unit kerja?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 249 Kerimbangan Beban Kerja Antar Unit

d. Berapa persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	1	10,0	10,0	10,0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	5	50,0	50,0	50,0
	61% - 80%	4	40,0	40,0	40,0
	81% - 100%	0	0	0	0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 250 Penyederhanaan Struktur Organisasi

e. *Apakah penyederhanaan struktur organisasi meningkatkan kinerja?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 251 penyederhanaan struktur organisasi meningkatkan kinerja

f. *Apakah evaluasi kelembagaan sudah dilaksanakan berdasarkan pedomean evaluasi kelembagaan sesuai permenpanrb 20/2018?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 252 evaluasi kelembagaan

14. Pelayanan publik

a. *Apakah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di KPU ?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	3	30,0	30,0	30,0
	Ya	7	70,0	70,0	70,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 253 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

b. *Apakah ada Rekomendasi hasil Evaluasi Pelayanan Publik di KPU?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	7	70,0	70,0	70,0
	Ya	3	30,0	30,0	30,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 254 Rekomendasi hasil Evaluasi Pelayanan Publik

c. *Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	7	70,0	70,0	70,0

	Ya	3	30,0	30,0	30,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 255 Rekomendasi sudah ditindaklanjuti

d. *Berapa Nilai Capaian Indeks Pelayanan Publik KPU?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	1	10,0	10,0	10,0
	41% - 60%	1	10,0	10,0	10,0
	61% - 80%	6	40,0	40,0	40,0
	81% - 100%	2	20,0	20,0	20,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 256 Nilai Capaian Indeks Pelayanan Publik

e. *Apakah setiap Unit Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	0	0	0	0
	Ya	10	100,0	100,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 257 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

f. *Apakah terdapat Rekomendasi pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	3	30,0	30,0	30,0
	Ya	7	70,0	70,0	70,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 258 Rekomendasi pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

g. *Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	20,0	20,0	20,0
	Ya	8	80,0	80,0	80,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 259 Rekomendasi SKM sudah ditindaklanjuti

h. *Berapa Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)? (Pertanyaan terbuka)*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0% - 20%	0	0	0	0
	21% - 40%	0	0	0	0
	41% - 60%	1	10,0	10,0	10,0
	61% - 80%	5	50,0	50,0	50,0
	81% - 100%	4	40,0	40,0	40,0
	Total	10	100,0	100,0	

Table 260 Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKM

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

- **Penyelenggaraan Tahapan Pemilu :**
Secara umum, tahapan pemilu telah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, termasuk pendaftaran pemilih, pembentukan Pantarlih, verifikasi partai politik, dan pencalonan. Semua pihak terkait telah melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- **Evaluasi Non-Tahapan:**
Tidak ada pelanggaran serius yang ditemukan dalam pelaksanaan tahapan. Penyelenggaraan dukungan fasilitasi seperti koordinasi antar lembaga juga berjalan lancar. Namun, beberapa kendala terkait sumber daya manusia dan logistik diidentifikasi di beberapa daerah terpencil.
- **Kendala Utama:**
Terdapat kendala dalam perekrutan Pantarlih, terutama di daerah-daerah terpencil, karena kurangnya peminat akibat faktor geografis dan kurang memadainya standar honor.

B. SARAN

- **Peningkatan Standar Gaji Pantarlih:** Untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi Pantarlih, perlu adanya penyesuaian honorarium yang lebih kompetitif, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
- **Perbaikan Sistem Logistik:** Pengiriman logistik harus lebih dimonitor, terutama di daerah terpencil yang mengalami kendala koordinasi dan distribusi. Penyediaan gudang penyimpanan yang lebih baik juga disarankan.
- **Penggunaan Teknologi:** Aplikasi seperti e-coklit dan Sipol sudah membantu dalam verifikasi dan pendaftaran pemilih, namun penggunaannya dapat lebih diperluas dengan sosialisasi yang lebih intensif agar lebih banyak digunakan oleh petugas di lapangan.
- **Pelatihan dan Rekrutmen:** Diperlukan pelatihan yang lebih intensif bagi petugas pemilu di daerah terpencil, terutama terkait penggunaan teknologi dan pengelolaan logistik.

- Kolaborasi dengan Stakeholder: Koordinasi dengan pihak terkait seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan instansi lainnya sudah baik, namun harus dipastikan terus berjalan secara efektif sepanjang pemilu.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dapat selesai disusun dengan baik dan lancar. Laporan ini menyajikan informasi proses tahapan, program, kegiatan dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Kalimantan Timur. Demikian laporan yang kami sampaikan sebagai bahan wujud pertanggungjawaban dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.